



Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan *Kota Semarang* 2012



Kerjasama

Bappeda Kota Semarang dan
Badan Pusat Statistik Kota Semarang
2013

SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT, kita bersyukur atas penerbitan Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Penggunaan Kota Semarang Tahun 2012. Produk Domestik Regional Bruto sisi Penggunaan adalah merupakan salah satu gambaran makro dan regional hasil kegiatan seluruh masyarakat di Kota Semarang dilihat dari sisi Konsumsi atau Penggunaan yang diukur dengan nilai ekonomi, yaitu dengan nilai uang.

Angka agregat ekonomi makro yang disajikan dalam Produk Domestik Regional Bruto Penggunaan Kota Semarang Tahun 2012 ini dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan terpadu yang senantiasa diharapkan keakuratan datanya terjaga dan terkoordinasi dari sumber data yang terkait sehingga dapat berhasil dan berdaya guna. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Penggunaan ini merupakan yang pertama kali dipublikasikan dengan tahun dasar 2000.

Akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk berbagai kepentingan sesuai dengan bidang tugas masing – masing dan bermanfaat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2013

**KEPALA BAPPEDA
KOTA SEMARANG**



BAMBANG HARYONO
Pembina Utama Muda

NIP. 19580410 198603 1 010

KATA PENGANTAR

Publikasi PDRB PENGGUNAAN Kota Semarang Tahun 2012 merupakan publikasi perdana hasil dari kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang dengan Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam rangka memberikan informasi statistik kepada masyarakat.

Publikasi ini memuat perkiraan tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, residual (ekspor neto dan perubahan stock) di Kota Semarang dalam periode 2011 – 2012. Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penentuan kebijakan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi pelaku usaha diharapkan juga bisa menjadi acuan untuk melakukan investasi di Kota Semarang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Walikota Semarang yang telah mempercayakan dan memberikan petunjuk kepada Badan Pusat Statistik Kota Semarang sehingga memungkinkan terbitnya publikasi ini. Ucapan yang sama disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya Kepala Bappeda Kota Semarang.

Kami sadari bahwa publikasi ini masih belum sempurna, maka kritik dan saran sangat kami nantikan dari semua pihak guna kesempurnaan publikasi selanjutnya.

Semarang,

2013

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA SEMARANG



ENDANG RETNO SRI SUBIYANDANI, S.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641023 198802 2 001



DAFTAR ISI

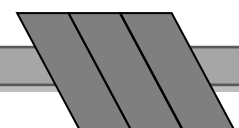
	Halaman
SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL POKOK	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Cara Penyajian dan Angka Indeks	4
II. METODOLOGI	
2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8
2.1.1. Ruang Lingkup	8
2.1.2. Metode Penghitungan	8
a. Kelompok Makanan	10
b. Kelompok Non Makanan	11
2.1.3. Sumber Data	12
2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	12
2.2.1. Ruang Lingkup	13
2.2.2. Metode Penghitungan	14
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan	14
2.3.1. Ruang Lingkup	14
2.3.2. Metode Penghitungan	15
2.3.3. Sumber Data	17
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18
2.4.1. Ruang Lingkup	18



2.4.2. Metode Penghitungan	19
2.4.3. Sumber Data	19
2.5. Perubahan Stock	20
2.5.1. Ruang Lingkup	20
2.5.2. Metode Penghitungan	21
a. Metode Langsung	21
b. Metode Tidak Langsung	21
2.6. Ekspor dan Impor	22

III. TINJAUAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN

3.1. PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2012	24
3.2. Perkembangan Kelompok Konsumsi	28
3.2.1. Konsumsi Rumah Tangga	28
3.2.2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	31
3.2.3. Konsumsi Pemerintah	32
3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	35





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 3.1.1. Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (milyar rupiah)	26
Tabel. 3.1.2. Distribusi Persentase Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2012 (persen)	27
Tabel. 3.1.3. Distribusi Persentase Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (persen)	27
Tabel. 3.2.1 Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011 – 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (milyar rupiah)	33
Tabel. 3.2.2 Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milyar rupiah)	34



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik. 3.2.1. Sumbangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Sub Makan dan Sub Non Makanan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2011 – 2012	30
Grafik 3.2.2. Sumbangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Sub Makan dan Sub Non Makanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Semarang Tahun 2011 – 2012	30
Grafik 3.2.3. Perubahan Sumbangan Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Semarang Tahun 2011 – 2012 (persen)	32
Grafik 3.2.4. Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011 – 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (milyar rupiah)	33
Grafik 3.2.5. Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milyar rupiah)	34



DAFTAR TABEL POKOK

	Halaman
Tabel. 1.1. Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	36
Tabel. 1.2. Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	36
Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	37
Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	37
Tabel 1.5. Distribusi Persentase Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	38
Tabel 1.6. Distribusi Persentase Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	38
Tabel 1.7. Indeks Implisit Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	39



Tabel 1.8.	Indeks Berantai Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	39
Tabel 1.9.	Indeks Berantai Perkiraan Produk Domestik Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (Jutaan Rupiah)	40

<https://semarangkota.bps.go.id>

BAB I



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu dinamika pembangunan suatu wilayah diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Oleh karena itu semua wilayah mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai salah satu strategi pembangunan wilayahnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi; faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kemampuan wilayah dalam menggerakkan sektor-sektor andalannya, kepercayaan dan kestabilan dunia perbankan dan pembiayaan pemerintah dalam menopang kegiatan perekonomian secara keseluruhan, selain itu keadaan sosial-politik juga menjadi faktor internal yang mempengaruhi pergerakan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan faktor eksternal lebih diakibatkan oleh perdagangan antar wilayah bahkan dengan luar negeri serta pertumbuhan ekonomi diwilayah sekitarnya.

Dari berbagai pendapat para pakar ekonomi dengan sudut pandang berbeda-beda, dalam mengkaji tentang pembangunan ekonomi, ternyata terdapat kesamaan persepsi bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh pembentukan modal wilayah tersebut.

Permasalahan yang timbul dalam pembentukan modal bagi daerah yang berkembang adalah ketersediaan tabungan domestik yang sangat terbatas. Oleh karena itu untuk dapat memenuhinya berbagai upaya dilakukan baik berupa pinjaman luar negeri, undangan untuk para investor maupun permintaan bantuan lembaga – lembaga donor.

Orientasi pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi pada masa lalu, berupaya meningkatkan pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan suatu wilayah. Kota Semarang yang merupakan daerah berkembang, berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menarik para investor besar untuk berinvestasi dan mengarah pada pengembangan industri manufaktur.

Hal lain yang menjadi masalah adalah pembangunan yang berkembang pesat tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor, sehingga tidak membangun fundamental ekonomi yang kuat dan kurang bersinergi dengan sektor-sektor yang telah lama tumbuh. Bahkan bisa jadi “mengorbankan” sektor lain yang telah mapan.

Dengan berbagai program akselerasi pembangunan, diharapkan pembangunan Kota Semarang, tidak hanya memiliki pertumbuhan yang tinggi akan tetapi juga membangun fundamen ekonomi yang kuat. Hal ini memiliki sasaran untuk pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan diimbangi dengan semakin berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan.

Untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi selain dari sisi produksi (lapangan usaha), maka pada buku ini akan diuraikan PDRB Kota Semarang dilihat dari sisi permintaan atau penggunaan akhir. Secara garis besar PDRB sisi penggunaan ini menjelaskan tentang :

- i. Bagaimana pendapatan yang diciptakan oleh seluruh lapisan masyarakat di suatu wilayah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir maupun kebutuhan lainnya.

- ii. Bagaimana struktur dan pola konsumsi masyarakat di wilayah tersebut terhadap penggunaan berbagai produk barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor.

Lazimnya format PDRB baku yang biasanya ditampilkan sesuai ketersediaan data adalah menurut penggunaan, yang secara teknis diartikan sebagai pemanfaatan barang dan jasa untuk konsumsi akhir (final demand). Dilihat dari sisi penggunaan akhir, data PDRB ini menurunkan agregat-agregat makro mengenai struktur/komposisi penggunaan akhir masing-masing komponen, pertumbuhan riil, serta indeks harga implisit.

Komponen penggunaan akhir ini meliputi; konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit pelayan rumah tangga (LNPRRT), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor dan impor.

Dengan kata lain, penyajian PDRB menurut penggunaan berarti melihat ekonomi dari sisi permintaan (*demand approach*). Permintaan dapat dibedakan menurut permintaan dalam negeri dan luar negeri. Permintaan dalam negeri terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan luar negeri merupakan ekspor barang dan jasa. Oleh karena sebagian permintaan barang dan jasa termasuk barang dan jasa berasal dari impor, sehingga untuk melihat permintaan PDRB, ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor akan diperoleh ekspor netto. Selisih permintaan dan penyediaan, termasuk perbedaan statistik dicakup dalam selisih stok.

Melalui pendekatan PDRB penggunaan ini akan dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatannya. Selain itu juga dapat diketahui besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap wilayah lain dalam bentuk perdagangan barang dan jasa (transaksi eksternal).

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada dasarnya pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, pemerataan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja.

Untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat diamati melalui berbagai indikator seperti; pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya. Disamping itu, data statistik dan indikator ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis dan menentukan arah kebijakan serta mengevaluasi hasil pembangunan. Berdasarkan teori keseimbangan penawaran dan permintaan, maka indikator ekonomi perlu juga dilihat dari sisi permintaannya. Salah satu indikator ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran tersebut adalah data PDRB menurut penggunaan.

1.3. Cara Penyajian dan Angka Indeks

Angka PDRB menurut penggunaan pada tahun 2012 disajikan baik atas dasar harga berlaku (*current price*) maupun atas dasar harga konstan (*constant price*).

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua komponen penggunaan dihitung atas dasar harga yang berlaku atau yang terjadi di masing-masing tahun.
- b. Pada penyajian atas dasar harga konstan tahun 2000, semua komponen penggunaan dihitung atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar 2000.

Untuk menghitung perkembangan riil dari PDRB penggunaan dari tahun ke tahun, digunakan harga konstan/tetap. PDRB penggunaan dapat pula disajikan dalam bentuk kontribusi atau peranan masing-masing komponen penggunaan terhadap total

PDRB-nya dan angka indeks berantai, indeks implisit yang masing-masing disajikan sebagai berikut :

1. Kontribusi/peranan masing-masing komponen penggunaan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari rasio masing-masing komponen terhadap total PDRB penggunaan dikalikan 100 persen. Rasio ini berarti seberapa besar peranan masing-masing komponen terhadap penciptaan PDRB penggunaan.
2. Indeks berantai diperoleh dari rasio nilai masing-masing komponen per tahun terhadap nilai komponen yang sama pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan (laju pertumbuhan) komponen penggunaan per tahun diperoleh dengan cara mengurangi dari angka indeks berantai tersebut.
3. Indeks implisit diperoleh dari rasio nilai masing-masing komponen per tahun atas dasar harga berlaku terhadap harga konstan dikalikan 100. Indeks ini dapat pula menggambarkan besaran inflasi yang terjadi.

BAB II



METODOLOGI

PDRB menurut penggunaan menggambarkan penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor dalam masyarakat. Penggunaan PDRB tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu :

- i. **Konsumsi Antara**, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi sebagai biaya antara.
- ii. **Konsumsi Akhir**, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sebagai konsumen akhir.

Untuk melihat hubungan antara pendapatan dan penerimaan terhadap barang dan jasa dapat ditulis sebagai berikut :

***PDRB SAMA DENGAN NILAI SELURUH PENGELUARAN AKHIR
DIKURANGI DENGAN NILAI TOTAL IMPOR***

Pengeluaran akhir merupakan pembelian dari semua barang dan jasa (barang konsumsi, output pemerintah dan lembaga swasta non profit, barang modal, perubahan persediaan serta semua barang yang diekspor) yang disuplai dalam suatu perekonomian. Nilainya akan melebihi dari output yang diproduksi oleh sektor-sektor produksi domestik sebesar nilai impor barang dan jasa.

Nilai produksi domestik akan diperoleh dari selisih pengeluaran akhir dengan total impor, yang persamaannya dapat ditulis :

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

- C_h = Konsumsi Rumah Tangga
- C_n = Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit
- C_g = Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan
- I_i = Pembentukan Modal Tetap Bruto
- I_s = Perubahan Stok
- X = Ekspor
- M = Impor
- Y = PDRB

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = C + I + X - M \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

- C = Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT),
Pemerintah dan Pertahanan
- I = Investasi
- X = Ekspor
- M = Impor
- Y = PDRB

2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2.1.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk konsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang-barang dan jasa.

Dalam hal barang-barang yang mempunyai kegunaan ganda, disamping untuk keperluan rumah tangga juga digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha rumah tangga, maka pembelian dan biaya-biayanya harus dialokasikan secara proporsional terhadap masing – masing kegiatan yang dilakukan.

Konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi :

1. Kelompok makanan, minuman dan tembakau;
2. Kelompok pakaian, alas kaki dan penutup kepala;
3. Kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air;
4. Kelompok barang yang tahan lama dan perlengkapan rumah tangga;
5. Kelompok perawatan dokter dan pengeluaran untuk obat-obatan;
6. Kelompok transportasi dan komunikasi;
7. Kelompok pengeluaran atas peralatan untuk keperluan rekreasi, hiburan dan jasa sosial lainnya;
8. Kelompok macam-macam barang dan jasa.

2.1.2. Metode Penghitungan

Metode penghitungan yang biasa dipakai untuk memperkirakan besarnya pengeluaran rumah tangga adalah :

1. Metode langsung yang berdasarkan pada hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) atau Survei Biaya Hidup (SBH).

2. Pendekatan dari segi arus barang dan jasa berdasarkan banyaknya barang dan jasa keperluan rumah tangga
3. Pendekatan dari segi penilaian harga eceran berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga dan berdasarkan harga eceran barang dan jasa.
4. Pendekatan lain yang berdasarkan pada data penjualan eceran.

Data konsumsi rumah tangga hasil Susenas masing-masing dinyatakan selama periode satu minggu untuk kelompok makanan dan selama satu bulan untuk kelompok non makanan. Untuk keperluan estimasi selama satu tahun digunakan estimasi sebagai berikut :

$$C_{(n+1)} = C_n + (b)(dp_{n+1}(C_n)) \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

- $C_{(n+1)}$ = Rata rata Konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun (n+1)
- C_n = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan tahun dasar (n) data Susenas
- $dp_{n+1}(C_n)$ = Perubahan pendapatan per kapita harga konstan tahun ke n dengan tahun ke (n+1)
- b = Koefisien elastisitas.

Berdasarkan formulasi tersebut, konsumsi per kapita diasumsikan tergantung kepada besarnya koefisien elastisitas (b) atau tingkat kecenderungan mengkonsumsi (MPC) suatu jenis komoditi apabila pendapatannya bertambah. Untuk mendapatkan nilai (b) ini dipakai analisis regresi silang (*cross section regression analysis*), dimana pengeluaran konsumsi perkapita menurut kelompok pengeluaran diregresikan dengan pendapatan per kapita.

Model garis regresi yang dipakai untuk kelompok makanan pada umumnya berupa fungsi eksponensial, sedangkan untuk non makanan menggunakan fungsi linier.

Pada hakekatnya ada jenis komoditi yang tidak akan bertambah banyak konsumsinya walaupun pendapatan seseorang bertambah, bahkan mungkin berkurang. Jenis komoditi ini dikatakan barang inferior untuk seseorang (misalnya ketela pohon, jagung dan lain – lain). Jika pendapatan seseorang naik, maka ia cenderung mensubtitusikan komoditas tersebut dengan komoditas lainnya (seperti terigu, roti dan lain – lain sejenisnya). Pada umumnya komoditas ini akan semakin banyak dikonsumsi apabila pendapatan seseorang bertambah.

a). Kelompok Makanan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk mendapatkan besarnya koefisien elastisitas (b) digunakan bentuk persamaan/fungsi eksponensial sebagai berikut :

$$Q_{(i)} = a \cdot Y_i^b \dots\dots\dots (4)$$

Dimana :

- $Q_{(i)}$ = Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)
- Y_i = Pendapatan perkapita sebulan (rupiah)
- a = Konstanta
- b = Koefisien elastisitas

Untuk menyederhanakan penghitungan persamaan eksponensial tersebut dibuat dalam bentuk linier dengan melogaritmakan :

$$\ln Q_i = \ln(a \cdot Y_i^b) \dots\dots\dots (5)$$

Atau,

$$\ln Q_i = \ln a + (b \cdot \ln Y_i) \dots\dots\dots (6)$$

Nilai koefisien b ini sebelum digunakan untuk mengestimasi, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk meyakinkan apakah menunjukkan signifikansi secara statistik. Apabila nilai koefisien korelasi (r) yang tinggi (mendekati angka 3), maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan konsumsi jenis barang dimaksud.

Setelah nilai koefisien (b) diperoleh dan nilai keabsahannya dapat diterima, maka konsumsi pada tahun-tahun lainnya yang tidak ada surveinya dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi seperti persamaan (3).

Selanjutnya nilai konsumsi kelompok makanan atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan mengalikan kuantitas komoditas (barang) tersebut dengan harga rata-rata setiap jenisnya pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Hasilnya dikalikan dengan 12 dan dikali lagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan tahun 2000, dilakukan dengan cara revaluasi yaitu kuantum per jenis komoditi barang pada masing-masing tahun yang bersangkutan dikalikan dengan 12 dan dikalikan lagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

b). Kelompok Non Makanan

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumah tangga kelompok non makanan digunakan bentuk persamaan/fungsi linier. Untuk mengestimasi konsumsi barang dan jasa dalam kelompok non makanan, pendapatan (satuan rupiah) dihubungkan dengan pengeluaran setiap jenis non makanan dalam satuan rupiah. Fungsi linier tersebut adalah :

$$Q_{(i)} = a + (b \cdot \ln Y_i) \dots\dots\dots (7)$$

Dimana :

- $Q_{(i)}$ = Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (rupiah)
- a = Konstanta
- b = Koefisien elastisitas.
- Y_i = Pendapatan perkapita sebulan (rupiah)

Untuk memperkirakan nilai pengeluaran setiap jenis kelompok non makanan pada tahun yang tidak mempunyai survei, digunakan formulasi persamaan (3). Perubahan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan ($dp(n+1)$) dihitung dengan menggunakan harga konstan, yaitu mendeflasikan dengan indeks harga konsumen

(IHK) yang sesuai dengan jenis barang yang dikonsumsi. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000 sesuai dengan tahun pelaksanaan Susenas yang digunakan. Aplikasi formulasi persamaan (3) menghasilkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan atas dasar harga konstan tahun 2000.

Untuk kelompok non makanan atas dasar harga berlaku, rata-rata pengeluaran atas dasar harga konstan tersebut di atas pada masing-masing tahun dikalikan dengan indeks harga konsumen (IHK) sesuai dengan jenis kelompok/sub kelompok masing-masing, hasilnya dikalikan dengan 12 dan dikalikan lagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

2.1.3. Sumber Data

Data perkiraan konsumsi rumah tangga bersumber dari hasil Susenas, yaitu rata-rata konsumsi perkapita seminggu (kuantum) untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan (rupiah) untuk kelompok non makanan. Disamping itu digunakan juga data lainnya seperti pendatan per kapita atas dasar harga konstan yang bersumber dari PDRB sektoral (lapangan usaha). Rata-rata harga eceran dan Indeks Harga Konsumen (IHK) bersumber dari statistik harga konsumen di kota dan pedesaan. Jumlah penduduk pertengahan tahun bersumber dari publikasi Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan dari data registrasi penduduk.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga Swasta Nirlaba adalah lembaga formal ataupun informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau oleh dunia usaha dalam rangka menyediakan jasa pelayanan khususnya bagi anggota maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan.

Ada 5 karakteristik yang menjadi ciri dari kegiatan Lembaga Swasta Nirlaba yaitu :

- a). Pada umumnya merupakan lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
- b). Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang ditempuh lembaga.
- c). Setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai laba atau surplus. Laba yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai lembaga.
- d). Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.
- e). Istilah nirlaba tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus usaha melalui kegiatan produktifnya. Surplus usaha yang diperoleh akan diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

2.2.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba meliputi semua pengeluaran atas pembelian atau penerimaan transfer, baik yang bentuk barang maupun jasa seperti pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung netto, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Lembaga lembaga tersebut meliputi lembaga penelitian dan pengetahuan, lembaga pendidikan formal maupun non formal, balai pengobatan dan kebudayaan organisasi profesi dan perserikatan dan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk tidak mencari untung. Ciri dari kegiatan-kegiatan lembaga nirlaba, pada umumnya dibiayai oleh dan digunakan sepenuhnya untuk anggota atau masyarakat.

2.2.2. Metode Penghitungan

Metode estimasi dilakukan berdasarkan hasil penghitungan dari sudut lapangan usaha, dengan mengumpulkan output dari sektor jasa-jasa sosial dimana lembaga swasta yang tidak mencari untung banyak berperan. Lembaga swasta yang dicakup dalam penghitungan ini terbatas pada jasa pendidikan, jasa kesehatan, panti asuhan dan jasa kemasyarakatan lainnya, sedangkan untuk kegiatan lainnya belum dilakukan estimasi dengan asumsi nilainya masih relatif kecil atau bahkan mungkin belum berperan sama sekali.

Penghitungan atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara yang sama, yaitu berdasarkan hasil penghitungan menurut lapangan usaha/sektoral.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.3.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai output akhir pemerintah adalah nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai serta perkiraan penyusutan barang modal pemerintah, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Kegiatan yang tidak dipisahkan tersebut adalah :

- 1). Kegiatan di instansi pemerintah yang memproduksi barang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan induknya. Penjualan barang-barang ini bersifat insidental dari fungsi pokok lembaga/departemen tersebut dan komoditi yang dihasilkan.
- 2). Kegiatan yang bersifat jasa seperti kegiatan rumah sakit, sekolah-sekolah, universitas, pemerintah, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai dari keuangan

pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai besarnya biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil kegiatan seperti ini disebut penerimaan non komoditi (pendapatan dari jasa yang diberikan).

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan gabungan dari pengeluaran konsumsi pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) yang mencakup pengeluaran konsumsi semua unit pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat II ditambah pengeluaran konsumsi pemerintah daerah tingkat I (propinsi) dan pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah daerah tingkat II. Komponen ini meliputi seluruh pengeluaran pemerintah di dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintah dan pertahanan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terdiri dari :

- a). Pembayaran upah gaji sebagai balas jasa tenaga kerja yang biasanya disebut dengan belanja pegawai.
- b). Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai/konsumsi dan disebut dengan belanja barang.
- c). Imputasi nilai penyusutan barang-barang modal pemerintah.

Total pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan konsumsi pemerintah dan merupakan penjumlahan dari masing-masing pengeluaran tersebut di atas dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa. Penjualan barang dan jasa meliputi penerimaan barang dan jasa yang dijual pemerintah kepada masyarakat yang pada prinsipnya tidak mengambil untung. Data yang tersedia disini tidak bisa dipisahkan sebagai unit yang berdiri sendiri.

2.3.2. Metode Penghitungan

Metode estimasi dilakukan melalui pendekatan langsung terhadap realisasi pengeluaran belanja pegawai dan belanja barang, baik yang bersumber dari belanja aparatur maupun dari belanja pelayanan publik, khususnya untuk menaksir besarnya

pengeluaran pemerintah sipil. Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi pertahanan keamanan (HANKAM) dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu dengan menggunakan metode alokasi dari angka nasional yang diperoleh dari BPS Jakarta cq. Direktorat Neraca Konsumsi.

Nilai konsumsi pemerintah sama dengan total outputnya dikurangi nilai komoditi dan non-komoditi yang dijualnya. Total output sama dengan total pengeluaran, maka nilai konsumsi pemerintah dapat diketahui apabila nilai komoditi dan non-komoditi yang dijualnya diketahui.

Untuk pemerintah daerah non komoditi dan komoditi yang dihasilkan muncul sebagai penerimaan sehingga datanya diperoleh dari jalur penerimaan APBD yang merupakan butir-butir penerimaan dari dinas - dinas. Nilai non-komoditi dan komoditi yang dijual pemerintah adalah jumlah penjualan kedua jenis produk tersebut pada setiap tingkat baik propinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan.

Untuk pemerintah daerah tingkat propinsi (tingkat I), nilai penjualan komoditi diduga berasal dari jumlah nilai butir-butir penerimaan dari dinas-dinas yaitu berupa hasil penjualan barang, sedangkan nilai penjualan non-komoditi berupa hasil penjualan jasa, penerimaan dari denda-denda, penjualan barang sitaan dan penerimaan sewa (rumah, gedung, kendaraan, lainnya).

Nilai penjualan komoditi dan non komoditi pemerintah daerah tingkat II, ditaksir dengan cara seperti pada pemerintah daerah tingkat I. Datanya terdapat pada APBD tingkat II. Sedangkan pemerintah desa/kelurahan tidak melakukan penjualan komoditi dan non-komoditi.

Nilai penjualan komoditi dan non-komoditi pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) adalah penjumlahan dari nilai komoditi dan non-komoditi pemerintah daerah tingkat II dan desa/kelurahan, ditambah dengan nilai komoditi dan non-komoditi dari pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah pusat yang merupakan bagian dari nilai komoditi dan non-komoditi pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota). Penghitungan nilai komoditi dan non-komoditi dari pemerintah

daerah tingkat I dan pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah daerah tingkat II, dilakukan dengan menggunakan alokator jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah otonom tingkat I yang berada di daerah tingkat II. Dengan menggunakan angka-angka tersebut pada sisi kanan neraca produksi pemerintah dapat disusun, dan dinilai konsumsi pemerintah menurut harga berlaku diperoleh.

Konsumsi pemerintah menurut harga konstan dapat diperoleh kalau neraca produksi menurut harga konstan bisa diperoleh. Hal ini dilakukan dengan ekstrapolasi atau deflasi terhadap butir-butir neraca produksi menurut harga berlaku.

Untuk melakukan ekstrapolasi dibutuhkan data indeks harga barang yang di konsumsi pemerintah, karena belum tersedia maka :

1. Ekstrapolasikan belanja pegawai tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai.
2. Deflasikan belanja tiap tahun dengan IHPB tanpa ekspor tahun yang sesuai.
3. Ekstrapolasikan penyusutan dengan indeks yang sesuai atau kalikan belanja pegawai yang telah diekstrapolasikan dengan lima persen.

Hasil pengkonstanan di atas merupakan output menurut harga konstan. Hasil kali rasio konsumsi pemerintah menurut harga berlaku dengan dengan total nilai output menurut harga konstan digunakan untuk menduga nilai konsumsi pemerintah menurut harga konstan.

2.3.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan diperoleh dari :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (K1, K2 dan K3), Badan Pusat Statistik.
2. Realisasi APBD, Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Jumlah pegawai negeri sipil seluruh Indonesia, Badan Administrasi Kepegawaian (BAKN).

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

2.4.1. Ruang Lingkup

Pembentukan modal bruto mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri/wilayah yang digunakan untuk memproduksi di dalam negeri / wilayah tersebut. Termasuk barang-barang modal adalah barang yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang modal sebagai alat yang tetap dalam memproduksi.

Adapun ciri-ciri barang modal adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai umur kegunaan lebih dari satu tahun, sehingga mempunyai nilai penyusutan.
2. Pengeluaran untuk barang modal mempunyai manfaat / hasil pada masa yang akan datang atau dalam jangka waktu yang relatif panjang.
3. Nilai per unit dari barang relatif besar dibanding dengan output sektor yang memakainya.

Menurut wujudnya pembentukan modal tetap bruto mencakup 5 hal :

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi, terdiri dari :
 - a. Bangunan tempat tinggal.
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal.
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan.
 - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan di atas.
2. Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan, terdiri dari :
 - a. Alat-alat transportasi seperti kapal laut, kapal terbang, kereta api, truk dan motor.
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian
 - c. Mesin mesin dan alat-alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan.

- d. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain.
 - e. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.
3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras.

Tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.

4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya atau bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
5. Margin pedagang atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak penguasaan hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam pembentukan modal tetap.

2.4.2. Metode Penghitungan

Pembentukan modal tetap bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha.

2.4.3. Sumber Data

Data yang tersedia hanya output sektor bangunan/konstruksi yang diperoleh dari hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha. Sedangkan pembentukan modal berupa mesin-mesin, peralatan, perluasan perkebunan, pengembangan tanah, hutan dan lain sebagainya diperhitungkan sebagai mark up,

mengingat data-data untuk keperluan tersebut tidak tersedia secara rinci.

Sebagai alternatif lain untuk industri dan perlengkapannya diperoleh melalui penyediaan output industri ditambah dengan impor barang pembentukan modal selain yang dikonsumsi rumah tangga. Karena mesin-mesin, alat-alat perlengkapan dan kendaraan, tidak dihasilkan, maka untuk pembentukan modal diperoleh hanya melalui data impor.

2.5. Perubahan Stok

Pengertian stok disini adalah persediaan barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi.

2.5.1. Ruang lingkup

Para pemegang stok adalah produsen, pedagang dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu pemegang stok barang keperluan strategis seperti bahan bakar, bahan pangan yang dipakai untuk operasi pasar. Pemegang stok yang lain adalah produsen dan pedagang. Stok pada produsen pada umumnya berupa bahan mentah, barang-barang atau alat-alat yang diproduksi tetapi masih dalam proses, atau barang-barang yang belum dipasarkan. Gedung-gedung/bangunan yang dalam proses tidak termasuk stok tetapi dicakup dalam pembentukan modal tetap bruto.

Stok pada pemeliharaan peternakan adalah termasuk yang digunakan sebagai ternak potong. Sedangkan untuk pembiakan, diambil tenaganya, bulunya, serta susunya termasuk pembentukan modal tetap. Namun kedua tujuan itu sulit dalam prakteknya, karena pada akhirnya semua ternak akan dipotong juga.

Perubahan stok merupakan selisih antara persediaan barang pada akhir tahun terhadap awal tahun. Persediaan barang-barang ini berasal dari pembelian atau yang diproduksi/pemerintah. Khusus stok di pemerintah biasanya merupakan penyediaan barang-barang pokok atau barang strategis, antara lain, beras, jagung, tepung terigu dan gula dihasilkan sendiri yang belum digunakan atau dijual lagi. Persediaan barang ini ada di produsen, pedagang/distributor Dalam menghitung perubahan stok dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu : Metode Langsung dan Metode tidak langsung (Metode Arus Barang).

2.5.2. Metode Penghitungan

a). Metode Langsung

Nilai Stok diperoleh dari setiap kegiatan dan jenis barang yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Laporan neraca keuangan dari perusahaan survei tahunan stok barang-barang ekspor. Nilai stok diperoleh berdasarkan laporan stok pada awal tahun dan akhir tahun, yang kemudian dinilai dengan nilai rata-rata harga pasar pada periode tahun perhitungan tersebut.

Dalam menilai barang-barang konsumsi antara dan penyediaan barang-barang jadi dengan harga pasar untuk suatu periode membutuhkan asumsi – asumsi mengenai :

- Kesepakatan penilaian yang dipakai dalam penghitungan data stok pada waktu membuat laporan;
- Kurun waktu pembentukan stok;
- Komposisi tiap-tiap barang pada stok, juga indeks harga yang digunakan untuk memperoleh rata-rata harga selama periode penghitungan.

b). Metode tidak langsung (Metode Arus Barang)

Yaitu dengan menghitung stok awal dan stok akhir dari tiap jenis barang. Data seperti ini mungkin hanya tersedia untuk beberapa jenis barang . oleh karenanya komponen perubahan stok ini diestimasi berdasarkan residual dari

Produk Domestik Regional Bruto sektoral dikurangi dengan komponen-komponen yang sudah dihitung dengan data yang tersedia.

2.6. Ekspor Dan Impor

Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir. Impor merupakan sumber suplai barang dan jasa. Impor bukan asli produksi domestik jadi harus dikurangkan dari total penggunaan dalam PDRB. Ekspor dan Impor barang dan jasa meliputi angkutan dan komunikasi, jasa asuransi serta barang dan jasa lain seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi penjualan di luar daerah dan pembayaran biaya kantor pusat perusahaan induk oleh cabang dan anak perusahaan di luar daerah. Pembelian langsung di pasar suatu daerah oleh bukan penduduk termasuk ekspor barang dan jasa, serta pembelian di luar daerah oleh penduduk daerah dikategorikan sebagai impor. Yang tidak termasuk ekspor dan impor barang adalah barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan saja, barang untuk peragaan, barang contoh dan barang untuk keperluan sehari-hari wisatawan mancanegara/ domestik. Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk.

Kegiatan ekspor dan impor meliputi suatu transaksi yang terjadi atas suatu barang dan jasa antara masyarakat suatu wilayah dengan masyarakat wilayah lain atau dengan luar negeri.

Transaksi ini menyangkut :

- Kegiatan ekspor dan impor barang;
- Kegiatan ekspor dan impor jasa-jasa, seperti : jasa pengangkutan, komunikasi, asuransi, dan jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu wilayah atas transaksi perdagangan di luar wilayah;

- Pembelian atas barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang dibeli pada waktu kapal merapat atau mendarat di pelabuhan wilayah lain atau di luar negeri;
- Kapal-kapal penangkap ikan dari suatu wilayah yang menjual hasil tangkapannya langsung di kapal asing;
- Transaksi beberapa barang tertentu, seperti barang dan jasa yang langsung dibeli di pasar domestik oleh yang bukan penduduk wilayah tersebut dan sebaliknya;
- Hal-hal dan kejadian ekspor dan impor atas perdagangan antar wilayah.

Catatan :

Barang-barang yang hanya melewati suatu wilayah sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan menuju atau kembali ke suatu tempat tidak termasuk dalam kegiatan di atas.

Untuk mendapatkan data ekspor dan impor yang sesuai dengan konsep dan ruang lingkup di atas masih sulit didapat. Namun demikian estimasi nilai ekspor dan impor diusahakan agar mendekati konsep dan lingkungannya. Untuk kegiatan ekspor impor lewat darat, Semarang yang berbatasan dengan daerah lain diestimasi berdasarkan arus barang yang melewati jembatan timbang.

BAB III



TINJAUAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Pembangunan ekonomi yang digambarkan oleh pertumbuhan ekonomi, selalu dijadikan salah satu target rencana strategi pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan ekonomi jangka panjang biasanya akan membawa dampak perubahan struktur ekonomi suatu wilayah. Dari sisi produksi, perubahan struktur ekonomi umumnya terjadi dari wilayah berbasis sektor pertanian menjadi wilayah berbasis sektor industri, yang tergambar dari tingginya peran industri manufaktur.

3.1. PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2012

Perekonomian Kota Semarang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi regional maupun internasional. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki bandara internasional Ahmad Yani dan juga Pelabuhan Tanjung Mas sebagai penyedia prasarana transportasi udara dan laut. Keduanya menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya tercipta lewat transportasi darat. Perkembangan

ekonomi Kota Semarang tidak hanya ditunjukkan oleh aktivitas ekonomi sektoral tetapi dapat juga dilihat dari komponen penggunaannya. Secara umum, peningkatan perekonomian sektoral, mempengaruhi peningkatan konsumsi PDRB penggunaan. Secara rata-rata atas dasar harga berlaku, pertumbuhan nilai konsumsi rumahtangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto untuk tahun 2011 sampai dengan 2012 menunjukkan peningkatan. Penyajian angka PDRB menurut komponen penggunaan tahun ini masih merupakan angka perkiraan. Untuk nilai konsumsi rumah tangga pada tahun 2011 mencapai 27.309,28 milyar rupiah dan terus meningkat sampai dengan tahun 2012 sebesar 30.499,55 milyar rupiah. Untuk nilai konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba juga mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 440,18 milyar rupiah menjadi 476,79 milyar rupiah pada tahun 2012. Untuk nilai Konsumsi Pemerintah tahun 2011 sebesar 6.188,76 milyar rupiah meningkat menjadi 6.907,79 milyar rupiah di tahun 2012. Juga nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tahun 2011 sebesar 26.436,24 milyar rupiah dan di tahun 2012 menjadi sebesar 29.461,99 milyar rupiah.

Sedangkan nilai komponen penggunaan atas dasar harga konstan 2000 dimana nilai Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2011 sebesar 11.733,88 milyar rupiah dan di tahun 2012 menjadi sebesar sebesar 12.611,23 milyar rupiah. Untuk nilai Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba pada tahun 2011 sebesar 124,07 milyar rupiah menjadi 129,09 milyar rupiah di tahun 2012. Nilai Konsumsi Pemerintah di tahun 2011 sebesar 2.461,71 milyar rupiah dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 2.639,37 milyar rupiah, dan nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) pada tahun 2011 sebesar 11.043,64 milyar rupiah menjadi 11.782,39 milyar rupiah pada tahun 2012

Tabel 3.1.1. Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (milyar rupiah)

Komponen Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	27.309,28	30.499,55	11.733,88	12.611,23
a. Makanan	10.597,37	12.020,08	4.561,81	4.892,47
b. Non Makanan	16.711,91	18.479,47	7.172,07	7.718,77
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	440,18	476,79	124,07	129,09
3. Konsumsi Pemerintah	6.188,76	6.907,79	2.461,70	2.639,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26.436,24	29.461,99	11.043,64	11.782,39
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok*)	-11.913,06	-12.961,49	-2.627,16	-2.965,60
P D R B	48.461,41	54.384,65	22.736,14	24.196,49

*) Residual

Jika melihat dari pertumbuhan atau peningkatan secara keseluruhan di tiap-tiap komponen penggunaan mempunyai pertumbuhan yang berfluktuasi, mulai tahun 2011 sampai dengan 2012. Konsumsi rumah tangga mempunyai tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,62 persen atas dasar harga berlaku dan 7,48 persen atas dasar harga konstan tahun 2000. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dimana laju pertumbuhan Konsumsi rumah tangga lebih mendominasi terhadap PDRB Kota Semarang di kedua sisi baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000.

Sedangkan andil atau distribusi persentase terhadap total PDRB dan dari komponen penggunaan sebagian besar relatif stabil baik andil atas dasar harga berlaku maupun konstan. Kontribusi terbesar pembentuk nilai PDRB menurut komponen pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga yang mencapai nilai di atas 50 persen tiap-tiap tahunnya, baik berdasarkan harga berlaku maupun atas dasar harga konstan

2000. Andil konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Tahun 2012 sebesar 56,08 persen atas dasar harga berlaku, dan 52,12 persen atas dasar harga konstan. Untuk konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba mempunyai andil sebesar 0,88 persen, dan konsumsi Pemerintah mempunyai kontribusi sebesar 12,70 persen. Sedangkan untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 54,17 persen.

Tabel 3.1.2. Distribusi Persentase Perkiraan PDRB Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2012 (persen)

Komponen Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku	
	2011	2012
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	56,35	56,08
a. Makanan	21,87	22,10
b. Non Makanan	34,48	33,98
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	0,91	0,88
3. Konsumsi Pemerintah	12,77	12,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	54,55	54,17

Tabel 3.1.3. Distribusi Persentase Perkiraan PDRB Kota Semarang Menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (persen)

Komponen Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku	
	2011	2012
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	51,61	52,12
a. Makanan	20,06	20,22
b. Non Makanan	31,54	31,90
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	0,55	0,53
3. Konsumsi Pemerintah	10,83	10,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	48,57	48,69

3.2. Perkembangan Kelompok Konsumsi

3.2.1. Konsumsi Rumah Tangga

Secara teoritis peningkatan konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh penambahan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pengeluaran atau penggunaan pada Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar dari seluruh pengeluaran yang ada. Konsumsi Rumah Tangga sering kali dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Peningkatan konsumsi dan perubahan proporsi pola konsumsi dari makanan menuju non makanan dijadikan indikator peningkatan pendapatan, kemampuan daya beli yang pada akhirnya dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga pada tahun 2012 atas dasar harga berlaku sebesar 30.499,55 milyar rupiah, lebih besar dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 27.309,28 milyar rupiah. Dari nilai tersebut, pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan sebesar 12.020,08 milyar rupiah, lebih besar dibandingkan konsumsi makanan tahun 2011 yang mencapai 10.597,37 milyar rupiah atau naik sebesar 13,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk konsumsi non makanan tahun 2012 meningkat sebesar 10,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau sebesar 16.711,91 milyar rupiah di tahun 2011 menjadi 18.479,47 milyar di tahun 2012.

Di Kota Semarang, konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 50 persen dari nilai total PDRB di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk sebagian besar masih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik makanan maupun non makanan.

Pada tahun 2012 PDRB atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi Rumah Tangga sebesar 56,08 persen dari nilai PDRB. Angka ini relatif stabil dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 56,35 persen.

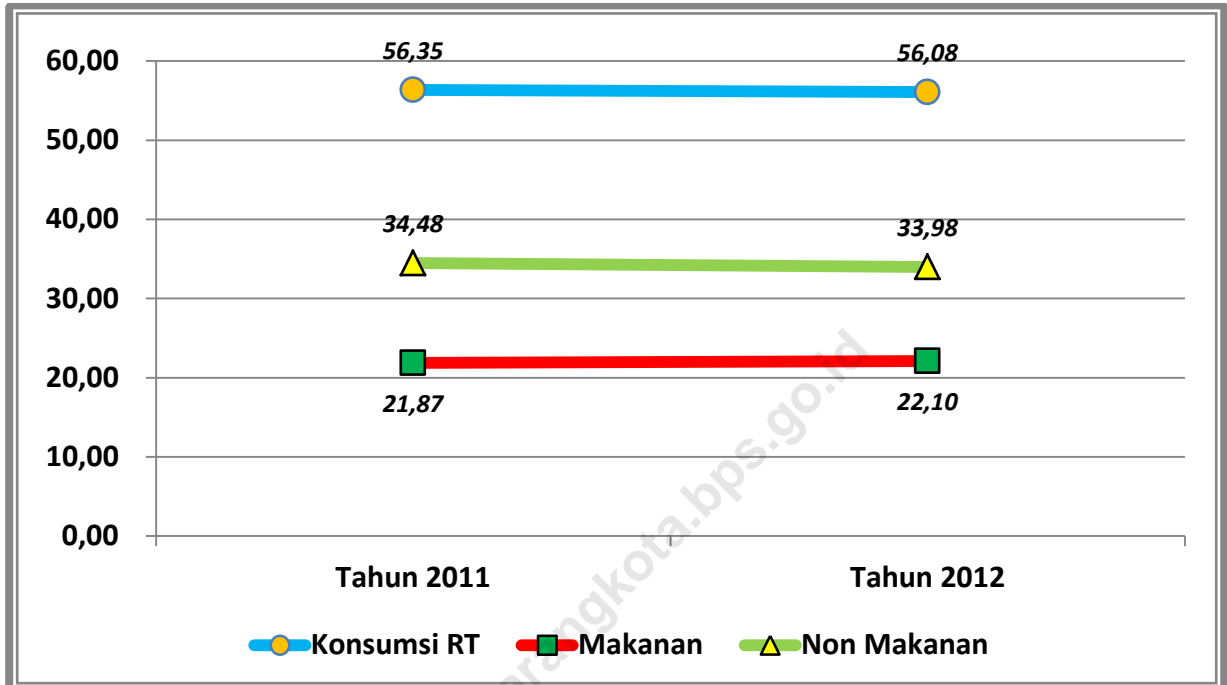
Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga digolongkan menjadi sub pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Jika dilihat pada tabel 3.1.2 dan

grafik 3.2.1.1. dapat dilihat peranan pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan menunjukkan angka yang seimbang. Terjadi perbedaan pola konsumsi masyarakat pada tahun 2012 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana sumbangan pengeluaran konsumsi makanan menunjukkan peningkatan sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan menunjukkan penurunan.

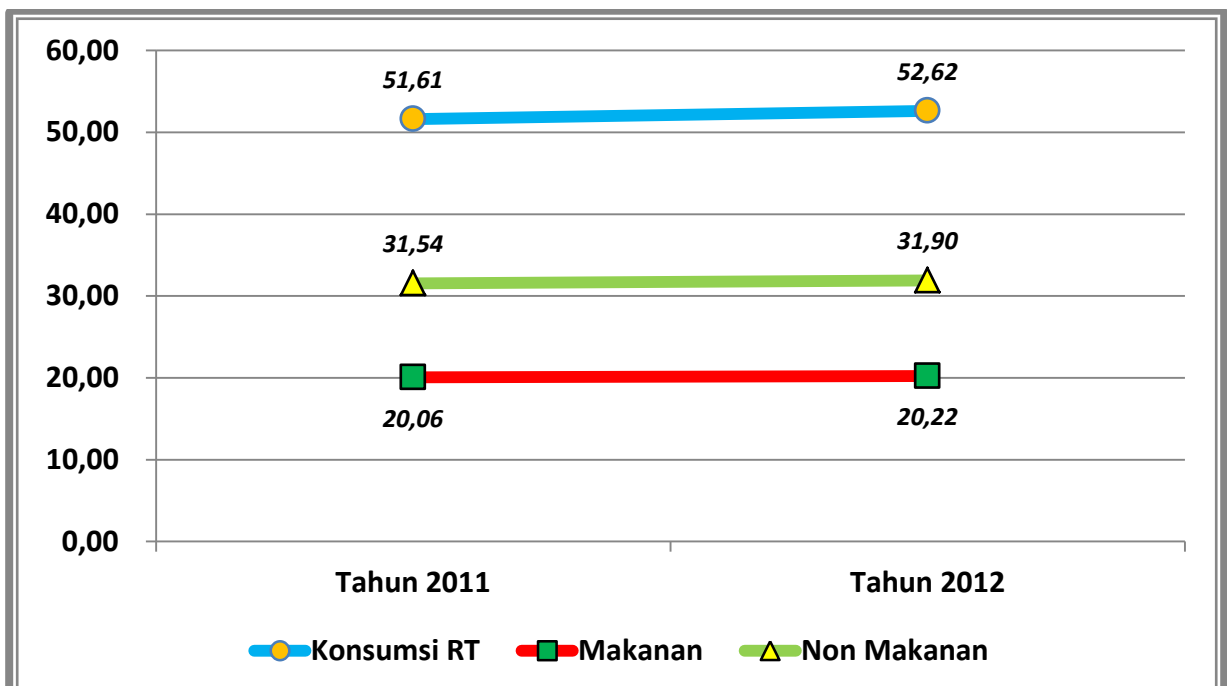
Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan, terjadi peningkatan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, dimana pada tahun 2011 pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga sebesar 51,61 persen dari nilai PDRB, naik menjadi 52,12 persen pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan pergeseran peranan konsumsi masyarakat yang mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika melihat pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, akan terlihat bahwa peranan pengeluaran untuk konsumsi makanan menunjukkan kenaikan dari tahun 2011 sebesar 20,06 persen, akhirnya menjadi 20,22 persen pada tahun 2012. Sedangkan peranan pengeluaran konsumsi untuk non makanan mengalami kenaikan dari tahun 2011 dengan pengeluaran sebesar 31,54 persen dari PDRB menjadi 31,90 persen di tahun 2012.

Grafik 3.2.1. Sumbangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Sub Makanan dan Sub Non Makanan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2011 – 2012



Grafik 3.2.2. Sumbangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Sub Makanan dan Sub Non Makanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Semarang Tahun 2011 – 2012



Pada grafik 3.2.1.1 menunjukkan sumbangan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berupa Makanan dan Non Makanan atas dasar harga berlaku mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 serta jumlah keduanya yang disebut pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Dan pada grafik 3.2.1.2 menunjukkan bahwa sumbangan nilai konsumsi rumah tangga makanan atas dasar harga konstan mulai tahun 2011 sampai dengan 2012. Dengan grafik diatas dapat terlihat pergerakan atau kecenderungan pergerakan dari konsumsi rumah tangga tersebut.

3.2.2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta nirlaba yang melayani rumah tangga adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk atau dibiayai oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan jasa pelayanan yang bersifat non komersial khususnya bagi anggota masyarakat umum tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan.

Dari ketiga jenis pengeluaran dalam kelompok konsumsi terlihat bahwa nilai terbesar atau andil terbesar adalah pengeluaran untuk konsumsi Rumah Tangga. Sedangkan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba mempunyai pengeluaran yang terkecil dari ketiga jenis penggunaan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan tahun 2000. Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 476,80 milyar rupiah, naik sebesar 8,32 persen dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 440,18 milyar rupiah. Pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba merupakan pengeluaran yang paling kecil terhadap nilai PDRB dibandingkan pengeluaran-pengeluaran yang lain, yaitu hanya sekitar 0,88 persen dari PDRB.

Sedangkan menurut harga konstan pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 129,09 milyar rupiah , naik sekitar 4,05 persen dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 124,07 milyar rupiah.

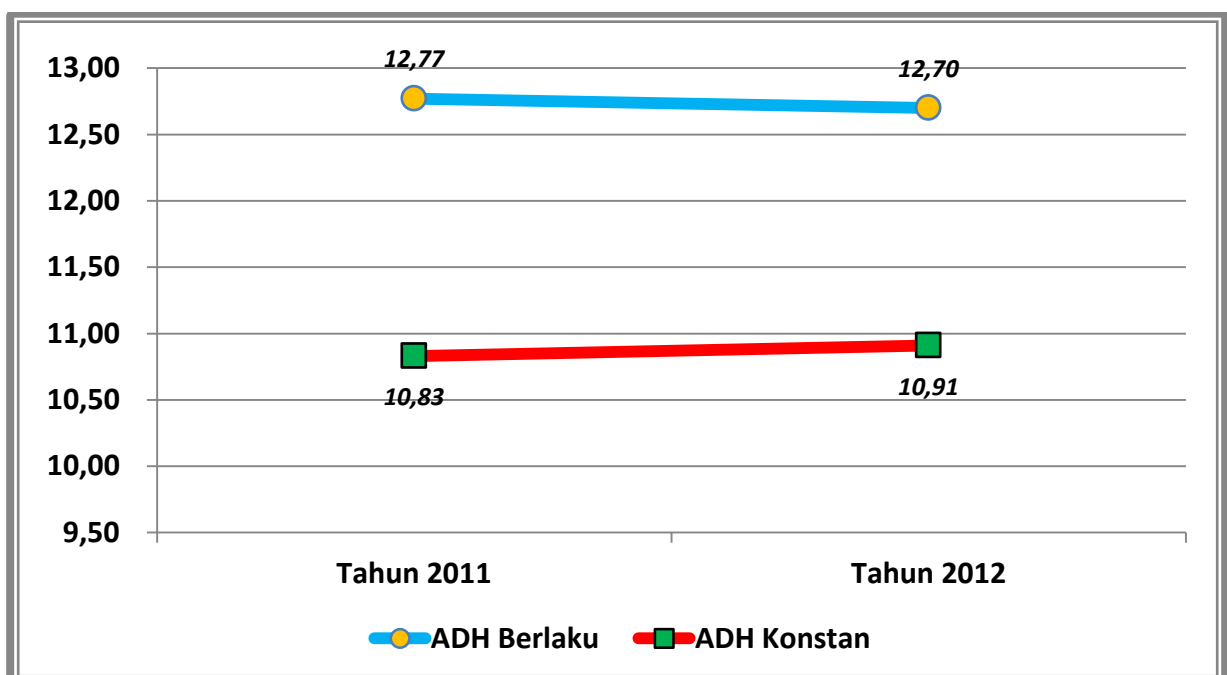
3.2.3. Konsumsi Pemerintah

Peran penting dari pemerintah dalam sistem perekonomian selain sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah juga merupakan konsumen akhir dimana permintaannya mempengaruhi struktur penyediaan domestik dan pertumbuhan ekonomi secara nyata.

Konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sebesar 6.907,80 milyar rupiah atau sekitar 12,70 persen dari PDRB. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 6.188,76 milyar rupiah atau sebesar 12,77 persen dari PDRB. Sedangkan atas dasar harga konstan untuk tahun 2012 sebesar 10,91 persen dari PDRB atau sebesar 2.639,37 milyar rupiah, menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2011 yang sebesar 10,83 persen dari PDRB atau sebesar 2.461,71 milyar rupiah.

Untuk melihat pergerakan peningkatan maupun penurunan sumbangan konsumsi pemerintah terhadap nilai PDRB, dapat dilihat pada grafik selanjutnya.

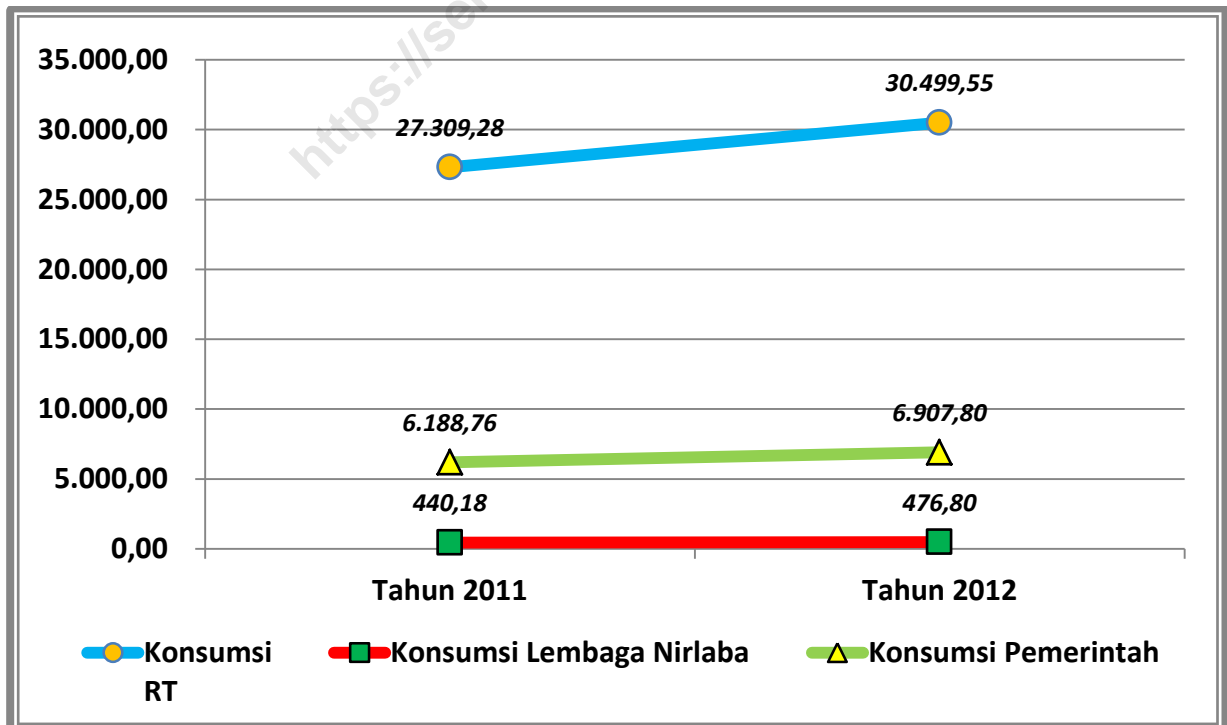
Grafik 3.2.3. Perubahan Sumbangan Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Kota Semarang Tahun 2011 – 2012 (persen)



Tabel 3.2.1. Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2012 (milyar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2011	2012
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	27.309,28	30.499,55
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	440,18	476,80
3. Konsumsi Pemerintah	6.188,76	6.907,80
Jumlah Konsumsi	33.938,22	37.884,15

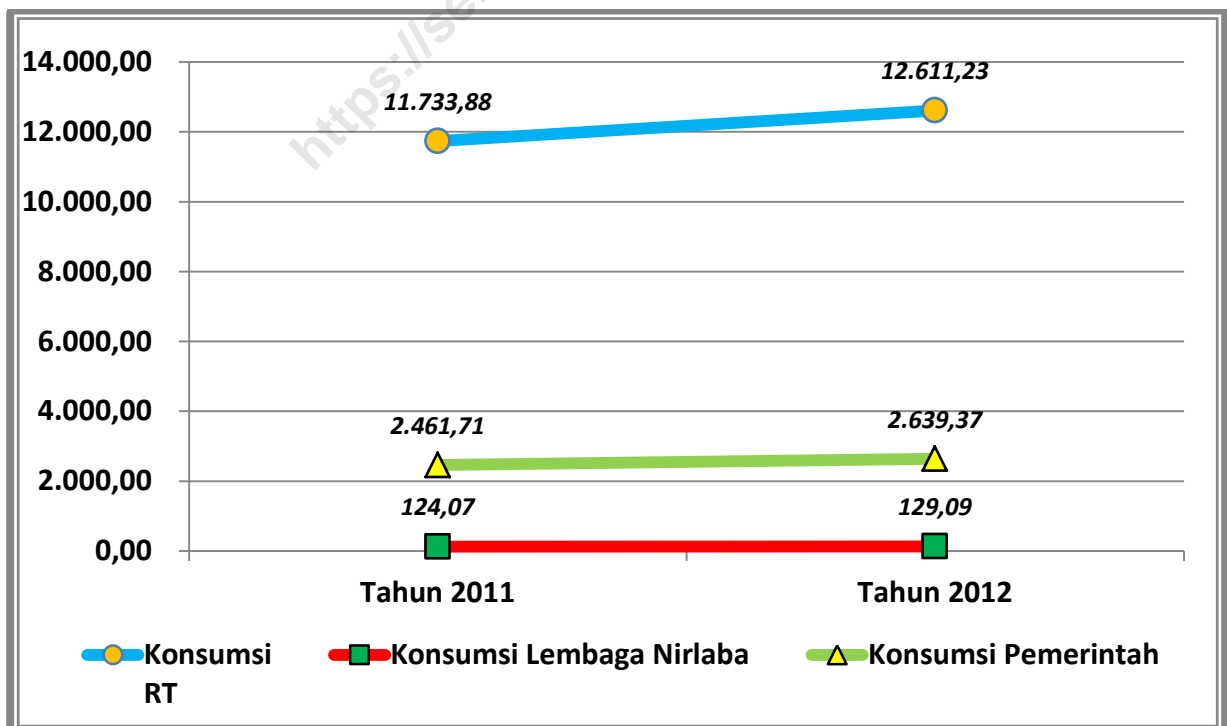
Grafik 3.2.4. Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2012 (milyar rupiah)



Tabel 3.2.2. Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 (milyar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2011	2012
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.733,88	12.611,23
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	124,07	129,09
3. Konsumsi Pemerintah	2.461,71	2.639,37
Jumlah Konsumsi	14.319,65	15.379,69

Grafik 3.2.5. Nilai Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba dan Pemerintah Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2012 (milyar rupiah)



3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memberikan informasi adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. Peranan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebagai unsur utama untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan usaha, sehingga pada giliran selanjutnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pembentukan Modal Kerja dapat digolongkan dalam bentuk bangunan / konstruksi, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapannya.

Pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai 29.462 milyar rupiah, lebih besar dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 26.436,25 milyar rupiah. Pertumbuhan PMTB atas dasar harga berlaku dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah 11,45 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu mencapai 11,08 persen. Peranan pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB adalah 54,55 persen tahun 2011 dan sebesar 54,17 persen di tahun 2012.

Pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga konstan pada tahun 2012 mencapai 11.782,39 milyar rupiah, atau naik sebesar 6,69 persen dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 11.043,64 milyar rupiah. Peranan pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB adalah 48,57 persen tahun 2011 dan sebesar 48,69 persen di tahun 2012.

Tabel 1.1. PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009 – 2012 (JUTAAN RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	2009 *)	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	21.813.639,81	24.386.000,57	27.309.284,25	30.499.551,78
a. Makanan	8.503.133,44	9.724.518,16	10.597.372,05	12.020.081,45
b. Non Makanan	13.310.506,36	14.661.482,42	16.711.912,20	18.479.470,33
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	379.474,55	417.308,20	440.183,69	476.796,99
3. Konsumsi Pemerintah	4.837.612,31	5.685.673,66	6.188.758,24	6.907.797,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.908.392,88	23.799.796,85	26.436.245,81	29.461.997,37
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	- 9.474.102,28	- 10.890.588,51	- 11.913.061,58	- 12.961.488,68
P D R B	38.465.017,28	43.398.190,77	48.461.410,41	54.384.654,53
<i>r). Residual</i>		**). <i>Angka Sementara</i>		
<i>*)). Angka Diperbaiki</i>		***). <i>Angka Sangat Sementara</i>		

Tabel 1.2. PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009 – 2012 (JUTAAN RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	2009 *)	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10.175.511,59	10.794.624,61	11.733.881,26	12.611.234,70
a. Makanan	3.939.120,00	4.275.345,40	4.561.810,74	4.892.465,55
b. Non Makanan	6.236.391,59	6.519.279,22	7.172.070,52	7.718.769,15
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	113.978,00	120.533,49	124.067,82	129.088,30
3. Konsumsi Pemerintah	2.153.782,34	2.349.968,95	2.461.705,75	2.639.370,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.436.180,99	10.263.599,09	11.043.643,99	11.782.392,64
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	- 1.698.874,97	- 2.162.908,35	- 2.627.162,63	- 2.965.598,43
P D R B	20.180.577,95	21.365.817,80	22.736.136,19	24.196.487,78
<i>r). Residual</i>		**). <i>Angka Sementara</i>		
<i>*)). Angka Diperbaiki</i>		***). <i>Angka Sangat Sementara</i>		

**Tabel 1.3. LAJU PERTUMBUHAN PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA
BERLAKU TAHUN 2009 – 2012 (PERSEN)**

Jenis Pengeluaran	2009	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-	11,79	11,99	11,68
a. Makanan	-	14,36	8,98	13,43
b. Non Makanan	-	10,15	13,99	10,58
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	-	9,97	5,48	8,32
3. Konsumsi Pemerintah	-	17,53	8,85	11,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	13,83	11,08	11,45
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	-	14,95	9,39	8,80
P D R B	-	12,83	11,67	12,22
<i>r). Residual</i>		<i>**). Angka Sementara</i>		
<i>*)). Angka Diperbaiki</i>		<i>***). Angka Sangat Sementara</i>		

**Tabel 1.4. LAJU PERTUMBUHAN PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009 – 2012 (PERSEN)**

Jenis Pengeluaran	2009	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-	6,08	8,70	7,48
a. Makanan	-	8,54	6,70	7,25
b. Non Makanan	-	4,54	10,01	7,62
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	-	5,75	2,93	4,05
3. Konsumsi Pemerintah	-	9,11	4,75	7,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	8,77	7,60	6,69
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	-	27,31	21,46	12,88
P D R B	-	5,87	6,41	6,42
<i>r). Residual</i>		<i>**). Angka Sementara</i>		
<i>*)). Angka Diperbaiki</i>		<i>***). Angka Sangat Sementara</i>		

Tabel 1.5. DISTRIBUSI PERSENTASE PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009 – 2012 (PERSEN)

Jenis Pengeluaran	2009 *)	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	56,71	56,19	56,35	56,08
a. Makanan	22,11	22,41	21,87	22,10
b. Non Makanan	34,60	33,78	34,48	33,98
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	0,99	0,96	0,91	0,88
3. Konsumsi Pemerintah	12,58	13,10	12,77	12,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	54,36	54,84	54,55	54,17
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	-24,63	-25,09	-24,58	-23,83
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>r). Residual</i>		<i>**). Angka Sementara</i>		
<i>*)). Angka Diperbaiki</i>		<i>***). Angka Sangat Sementara</i>		

Tabel 1.6. DISTRIBUSI PERSENTASE PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009 – 2012 (PERSEN)

Jenis Pengeluaran	2009 *)	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	50,42	50,52	51,61	52,12
a. Makanan	19,52	20,01	20,06	20,22
b. Non Makanan	30,90	30,51	31,54	31,90
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	0,56	0,56	0,55	0,53
3. Konsumsi Pemerintah	10,67	11,00	10,83	10,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	46,76	48,04	48,57	48,69
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	-8,42	-10,12	-11,56	-12,26
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>r). Residual</i>		<i>**). Angka Sementara</i>		
<i>*)). Angka Diperbaiki</i>		<i>***). Angka Sangat Sementara</i>		

**Tabel 1.7. INDEKS IMPLISIT PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 TAHUN 2009 – 2012**

Jenis Pengeluaran	2009 *)	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	214,37	225,91	232,74	241,84
a. Makanan	215,86	227,46	232,31	245,69
b. Non Makanan	213,43	224,89	233,01	239,41
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	332,94	346,22	354,79	369,36
3. Konsumsi Pemerintah	224,61	241,95	251,40	261,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	221,58	231,89	239,38	250,05
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	557,67	503,52	453,46	437,06
P D R B	190,60	203,12	213,15	224,76
<i>r). Residual</i>		<i>**). Angka Sementara</i>		
<i>*)). Angka Diperbaiki</i>		<i>***). Angka Sangat Sementara</i>		

**Tabel 1.8. INDEKS BERANTAI PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA
BERLAKU TAHUN 2009 – 2010 (PERSEN)**

Jenis Pengeluaran	2009 *)	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-	111,79	111,99	111,68
a. Makanan	-	114,36	108,98	113,43
b. Non Makanan	-	110,15	113,99	110,58
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	-	109,97	105,48	108,32
3. Konsumsi Pemerintah	-	117,53	108,85	111,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	113,83	111,08	111,45
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	-	114,95	109,39	108,80
P D R B	-	112,83	111,67	112,22
<i>r). Residual</i>		<i>**). Angka Sementara</i>		
<i>*)). Angka Diperbaiki</i>		<i>***). Angka Sangat Sementara</i>		

**Tabel 1.9. INDEKS BERANTAI PERKIRAAN PDRB KOTA SEMARANG
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 TAHUN 2009 – 2012 (PERSEN)**

Jenis Pengeluaran	2009 *)	2010 *)	2011 **)	2012 ***)
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-	106,08	108,70	107,48
a. Makanan	-	108,54	106,70	107,25
b. Non Makanan	-	104,54	110,01	107,62
2. Konsumsi Lemb Swasta Nirlaba	-	105,75	102,93	104,05
3. Konsumsi Pemerintah	-	109,11	104,75	107,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	108,77	107,60	106,69
5. Ekspor Netto + Perubahan Stok *)	-	127,31	121,46	112,88
P D R B	-	105,87	106,41	106,42

r). Residual

**). Angka Sementara

*)). Angka Diperbaiki

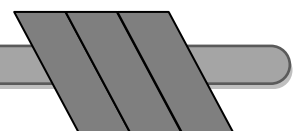
***). Angka Sangat Sementara



BAB I

PENDAHULUAN

<https://semarangkab.go.id>

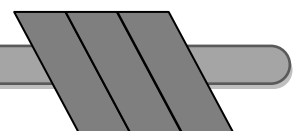




BAB II

METODOLOGI

<https://semarangkota.pps.go.id>





BAB III
TINJAUAN PDRB
MENURUT
PENGGUNAAN

